DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PEMBANTU PADA SATKER DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

NO	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualikan	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Berkaitan dengan informasi Pegawai				
	- Laporan Keuangan yang belum diaudit	- Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah		Belum terjamin kebenarannya	belum diaudit agar tidak dipublikasikan
	- Kode PIN Rekening Bank Pegawai	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6		Penyalahgunaan oleh pihak lain	keamanan rekening bank
	- DP-3/SKP	- UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1)7/2/2019 h dan i dan (2)	---	disalahgunakan yang tidak orang berkepentingan	Merupakan akta autentik yang bersifat rahasia atau data pribadi
	- Biodata pegawai	- UU no. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian			
2	- Surat keluar masuk yang dianggap rahasia	- Perwali Palangka Raya tentang Tata Naskah		Mengganggu kebijakan pimpinan	menjaga suasana lingkungan kinerja yang kondusif
3	Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa				
	- SPJ	- Pasal 19 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab keuangan Negara	---	mengganggu selama proses pemeriksaan dan sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada legislatif terhadap informai yang dikecualikan yang terdapat pada pasal 17 UU Keterbukaan publik	tidak mengganggu proses pemeriksaaan
	- SPP/SPM/SP2D/Nota Pembayaran	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ps. 42 dan 43 - Kepmen PU & PR No.451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 tt perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak		Muncul persaingan usaha tidak sehat	menjaga objektivitas penilaian

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Foto dokumentasi kontak barang dan jasa - Perkiraan Harga Sendiri (HPS) barang dan jasa - Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmen PU & PR No.451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 tt perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak. - Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa 		<p>Muncul persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Muncul persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Muncul persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>menjaga objektivitas penilaian</p> <p>menjaga objektivitas penilain harga</p> <p>menjaga objektivitas penilain harga</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Lelang, Dokumen Kontrak, Gambar, RAB (BQ), Addendum dari Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor Lelang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ps. 42 dan 43 - Kepmen PU & PR No.451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 tt perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak 		<p>Muncul persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>menjaga objektivitas penilaian harga</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> - Kode akses elektronik aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE 		<p>disalahgunakan yang tidak berkepentingan</p>	<p>menjaga keamanan data</p>